

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Optimalisasi Potensi
Sumberdaya Lokal
Menghadapi MEA 2015



Yogyakarta, 23 Mei 2015



Kerjasama antara:
Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia
(PERHEPI)

SEMINAR NASIONAL

Optimalisasi Potensi Sumberdaya Lokal Menghadapi MEA 2015

Yogyakarta, 23 Mei 2015

PROSIDING

EDITOR:

Siti Yusi Rusimah

Indardi

Muhammad Fauzan

Achmad Fachruddin



**Kerjasama antara:
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
dan
Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia
(PERHEPI)**

PROSIDING SEMINAR NASIONAL
OPTIMALISASI POTENSI SUMBERDAYA LOKAL MENGHADAPI MEA 2015
Yogyakarta, 23 Mei 2015

TIM PENYUSUN

PENGARAH:

- Ir. Eni Istiyanti, MP
- Dr. Ir. Widodo, MP

EDITOR:

- Ketua : Ir. Siti Yusi Rusimah, MP
- Anggota : Dr. Ir. Indardi, MSi
Muhammad Fauzan, SP. MSc
Achmad Fachruddin, SE. MSi

DESAIN DAN TATA LETAK:

- Rohandi Azis

Diterbitkan oleh:

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Jl. Lingkar Selatan Tamantirto, Bantul. D.I.Yogyakarta 55183

Telp : +62274 387656

Faks : +62274 387646

e-mail : agribisnis@umy.ac.id, agribisnis.umy@gmail.com

Website : <http://agribisnis.umy.ac.id>

ISBN: 978-602-7577-43-5

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan kenikmatan yang telah kita terima, sehingga PROSIDING Seminar Nasional dengan tema Optimalisasi Sumberdaya Lokal Menghadapi MEA 2015 dapat diterbitkan.

PROSIDING disusun berdasarkan hasil SEMINAR NASIONAL kerjasama Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UMY dengan Perhepi Komda DIY yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2015 di Yogyakarta. Penyelenggaraan seminar dimaksudkan untuk mengenal dan memahami berbagai situasi dalam mempersiapkan masyarakat pelaku ekonomi di Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia. Sebagai negara agraris terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi sumberdaya lokal yang berlimpah. Optimalisasi sumberdaya penting dan mendesak untuk dilakukan agar produk yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi dapat bersaing dengan negara lain.

Seminar melibatkan peneliti, dosen, mahasiswa dan anggota Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), yang mempresentasikan empat makalah utama dan 47 (empat puluh tujuh) makalah pendukung. Presentasi dibagi dalam empat kelompok sub tema, yaitu Kewirausahaan dan Pasar, Teknologi dan Industri, Sumberdaya dan Kearifan Lokal, serta Kemitraan dan Komunikasi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada *keynote speech* Dr. Ir. Johnny Walker Situmorang, MS (Kementerian Koperasi dan UKM), Prof. Dr. Bambang Cipto (Rektor UMY), para narasumber Dr. Bayu Krisnamurthi, M.Si (Ketua Perhepi Pusat), H. Suharyo Husen (Direktur Pondok Ratna Farm), dan Prof. Dr. Ir. Masyhuri (Ketua Perhepi Komda DIY), tamu undangan serta seluruh peserta seminar nasional. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Perhepi Komda DIY, Program Studi Agribisnis UMY dan seluruh panitia atas terselenggaranya seminar dan terbitnya PROSIDING ini. Semoga Allah SWT meridhai semua segala usaha kita dan mencatatnya sebagai amal ibadah. Amin.

Yogyakarta, 19 Juni 2015
Ketua Panitia Seminar Nasional

Dr. Aris Slamet Widodo, SP, MSc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
Optimalisasi Potensi Sumberdaya Lokal dalam Menghadapi MEA 2015	1
Suharyo Husen	
SUBTEMA: KEWIRAUSAHAAN DAN PASAR	28
Profil dan Kinerja UMKM Pangan Olahan Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta Ummu Harmain, Slamet Hartono, Lestari Rahayu Waluyati, Dwidjono Hadi Darwanto	29
Upaya Peningkatan Keuntungan Pengrajin Batik Tulis "Labako" Melalui Aplikasi Teknologi Tool Linux Berbasis Metode Fraktal di Kabupaten Jember.....	41
Syamsul Hadi, Taufiq Timur Warisaji	
Sistem Distribusi Ternak dan Hasil Ternak Sapi Potong di Indonesia.....	52
Bambang Winarso	
Strategi Pengembangan Sukun sebagai Komoditas Unggulan Kepulauan Seribu di DKI Jakarta.....	67
Waryat, Muflihani Yanis, Kartika Mayasari	
Persepsi dan Evaluasi Pengembangan Jambu Mete di Desa Wisata Karangtengah, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.....	82
Banyuriatiga, Aris Slamet Widodo, Sriyadi	
Strategi Pemasaran Dodol Nanas Tangkit di Muara Jambi (Studi Kasus pada CV. Tulimario Tangkit Muara Jambi).....	91
Erwan Wahyudi, Adri, Endrizal	
Peluang Pengembangan Peyek Kripik Pegagan di Kawasan Rumah Pangan Lestari Cancangan, Sleman.....	103
Murwati, Nurdeana, Sutardi	
Perkembangan Komoditas Bawang Merah Indonesia dan Daya Saing di Pasar Internasional.....	110
Nanang Kusuma Mawardi	
Validasi Peluang Pasar Hasil Tangkapan dan Produk Olahan Ikan pada Masyarakat Lokal Wilayah Pesisir di Kabupaten Merauke.....	119
Untari, Dirwan Muchlis, Norce Mote, David S. Pangaribuan, Boni Lantang, Irianis Latupeirissa, Rosa D Pangaribuan, Tarsisius Kanna	
Studi Komparatif Kelayakan Usahatani Jamur Tiram Dataran Tinggi dan Dataran Rendah di DIY.....	130
Nurul Salehawati	
SUBTEMA: TEKNOLOGI DAN INDUSTRI	142
Pengembangan Mesin Sangrai Kopi Berbahan Bakar Lokal di Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur.....	143
Arustiarso, Puji Widodo, Atika Hamaisa	

Penyaluran, Pengelolaan dan Kinerja Mesin Tanam Bibit Padi (<i>Rice Transplanter</i>) di Jawa Tengah.....	150
Chanifah, E. Kushartanti, D. Sahara	
Analisis Pengaruh <i>Wind Barrier</i> dan Sumur Renteng terhadap Produksi dan Risiko Usahatani Konservasi Lahan Pantai di Kabupaten Bantul.....	171
Aris Slamet Widodo	
Model Pengembangan Pertanian Perdesaan Melalui Inovasi (M-P3MI) Berbasis Kakao di Aceh Timur.....	183
Basri A. Bakar, Abdul Azis	
Efisiensi Teknis Usahatani Padi di Subak Gubug I Kabupaten Tabanan.....	194
Nyoman Ngurah Arya, I Ketut Mahaputra, Jemmy Rinaldi	
Uji Adaptasi dan Respon Petani terhadap Empat Varietas Kedelai untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Gunungkidul.....	206
Charisnalia Listyowati, Sri Wahyuni Budiarti, Eko Srihartanto	
Efisiensi Produksi Susu Kambing pada Usahatani Integrasi Tanaman Kopi-Kambing di Kecamatan Busungbiu.....	214
Nyoman Ngurah Arya, I Ketut Mahaputra, Suharyanto	
Analisis Biaya Produksi Sistem Integrasi dari Limbah Perkebunan dan Limbah Agroindustri di Kabupaten Kampar.....	225
Evy Maharani, Susy Edwina, Joko Prestiwo	
Pengembangan Teknologi Tepatguna Biogas	236
Arustiarso, Teguh Wikan W, Ahmad Ashari	
Analisis Kesesuaian Inovasi Teknologi dengan Kebutuhan Petani di Provinsi Aceh.....	245
Basri A. Bakar, Abdul Azis, Nazariah	
Efisiensi Penggunaan Alsintan dalam Usahatani di Lahan Pasir Pantai Selatan Kabupaten Bantul.....	257
Subagyo, Nugroho Siswanto	
Pengaruh Faktor Produksi dalam Penerapan Pengelolaan Tanam Terpadu (PTT) Padi Sawah di Bali.....	265
I Ketut Mahaputra, Suharyanto, Ngurah Arya	
SUBTEMA: SUMBERDAYA DAN KEARIFAN LOKAL	277
Revolusi Sumber Daya Berbasis Kearifan Lokal.....	278
Amruddin	
Analisis Komoditas Unggulan Tanaman Pangan Spesifik Lokasi di Provinsi Jambi.....	285
Adri, Erwan Wahyudi, Endrizal	
Zonasi Kawasan Terpapar Erupsi Gunung Merapi 2010 di Desa Kepuharjo sebagai Dasar Penentuan Tingkat Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Jagung (<i>Zea Mays L.</i>).....	297
Siska Ema Ardiyanti, Gunawan Budiyanto, Mulyono	
Paradigma Baru Lahan Sawah sebagai Strategi Melestarikan Sumberdaya Lokal yang Ada di Pedesaan.....	312
Markus Patiung, Erna Haryanti, Dwi Prasetyo Yudo	

Analisis Komparatif Tanaman Perkebunan dan Kebutuhan Teknologi Tanaman Karet Rakyat di Provinsi Jambi.....	324
Firdaus, Erwan Wahyudi, Adri	
Strategi Optimasi Petani Gambir di Sebuah Nagari di Limapuluh Kota, Sumatera Barat	335
Osmet	
Potensi Pembangunan Biogas di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Permasalahannya....	363
Sriyadi	
Keterkaitan Sektor Pertanian dengan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Desa Rawan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	375
Rahima Kaliky, Sri Budhi Lestari, dan Nur Hidayat	
Kinerja Usahatani Budidaya Ikan Air Tawar di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya.....	391
Fadhila Najmi Laila Hikmat, Lestari Rahayu, Siti Yusi Rusimah	
Implementasi Program Gernas Kakao dalam Rangka Menghadapi MEA di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan.....	400
Eka Triana Yuniarsih, Rahima Kaliky	
SUBTEMA: KEMITRAAN DAN KOMUNIKASI	411
Produksi Benih Padi Melalui Pola Kemitraan antara Produsen dengan Penangkar di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	412
Hano Hanafi dan Suradal	
Pola Kemitraan Usahatani Kedelai Edamame (<i>Glycine Max</i> (L) Merr) antara Petani dengan PT. Lumbang Padi di Kabupaten Garut.....	427
Carkum Cahyanto, Eni Istiyanti	
Pengelolaan Dana Penguatan Modal di Kelompok Peternak Sapi An dhini Rejo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.....	436
Budi Fajar Imaduddin, Lestari Rahayu, Siti Yusi Rusimah	
Dinamika Kelompok Usaha Budidaya Ikan Nila dengan Sistem <i>Collective Farming</i>	452
Ilham Ade Zakaria, Siti Yusi Rusimah, Sriyadi	
Pembangunan Pertanian Tanpa Kerjasama Sosial: Tantangan Menghadapi MEA 2015...	464
Endry Martius	
Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong di Indonesia Melalui Program Sarjana Membangun Desa Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong di Indonesia Melalui Program Sarjana Membangun Desa.....	476
Bambang Winarso	
Sejarah Pembangunan dan Perolehan Sertifikasi Ekolabel Hutan Rakyat Desa Sumberejo dan Selopuro.....	493
Purwanto	

Persepsi Petani terhadap Teknologi Pendampingan SL-PTT Kedelai di Gunungkidul Murwati, Sri Wahyuni dan Heri Basuki	506
Karakteristik Petani Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit yang Mempengaruhi Adopsi Inovasi di Kabupaten Pelalawan..... Susy Edwina, Evy Maharani, Bungaran Situmorang	515
Komunikasi Pembangunan untuk Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah.... Indardi	525
Keterlibatan Anggota Kelompok Wanita Tani dalam Kegiatan Lumbung Pangan..... Erlyta Dwi Hapsari, Siti Yusi Rusimah, Retno Wulandari	537
Kemitraan Petani dengan Industri Pengolah Ubi Jalar di Provinsi Jawa Barat Kurnia Suci Indraningsih	550

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ERA OTONOMI DAERAH

Indardi

Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian UMY

ABSTRAK

Konsep komunikasi pembangunan lahir lahir di negara-negara berkembang yang memandang pentingnya proses komunikasi dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Kehadiran komunikasi pembangunan memberikan kontribusi terhadap berbagai pemecahan masalah komunikasi dalam program-program pembangunan. Memasuki era Otonomi Daerah paradigma pembangunan mengalami perubahan yang mendasar yang menekankan partisipasi dari bawah yang menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan baru pembangunan. Hal ini merubah secara mendasar terhadap proses komunikasinya. Pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat sangat menekankan komunikasi interaktif dan transaksional dari pada proses linear. Proses komunikasi dalam pembangunan yang lebih menekankan proses interaktif dan transaksional dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat tersebut lebih sesuai di era ini dalam menyambut MEA 2015 dengan segala konsekuensinya.

Kata kunci: Komunikasi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, Otonomi Daerah.

KONSEP KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

Pembangunan adalah proses perubahan sosial ekonomi menuju kondisi yang direncanakan (Rogers EM. 1976). Komunikasi pembangunan adalah proses komunikasi yang menyertai dalam kegiatan pembangunan. Sejak penghujung tahun 60-an, di kalangan ilmu komunikasi telah berkembang suatu spesialisasi mengenai penerapan teori dan konsep komunikasi secara khusus untuk keperluan pelaksanaan program pembangunan. Pengkhususan itu kemudian dikenal dengan *komunikasi pembangunan*. Sementara di University of Philippine, Los Banos; yang dipandang sebagai cikal bakal tumbuhnya komunikasi pembangunan adalah disiplin ilmu *komunikasi pertanian*.

Kehadiran komunikasi pembangunan dapat dipandang sebagai suatu perwujudan respon kalangan disiplin komunikasi untuk menyumbang dan menerapkan ilmunya, dalam rangka ikut ambil bagian menjawab tantangan dan tuntutan pembangunan. Pada hakekatnya perbedaan lahiriah antara kegiatan komunikasi pembangunan dengan yang “bukan komunikasi pembangunan” nyaris tidak kelihatan. Disebut sebagai komunikasi

pembangunan apabila sudah benar-benar dikaitkan dengan tujuan suatu proyek pembangunan secara khusus atau dan program-program pembangunan nasional secara keseluruhan (Nasution, 1996).

Ada beberapa konsep dalam komunikasi pembangunan yang penting dan perlu diungkapkan pada kajian ini diantaranya; peliputan pembangunan (*development reporting*), komunikasi pendukung pembangunan (*development support communication*), periklanan pembangunan (*development advertising*), serta penyuluhan khususnya penyuluhan pertanian (*agricultural extension*). Berbagai konsep ini memiliki perannya masing-masing di dalam konteks pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Development reporting atau peliputan pembangunan muncul (di penghujung tahun 60-an) didasarkan pada keinginan untuk melaksanakan kebijakan pemberitaan yakni suatu kegiatan yang mendukung untuk meliput berbagai informasi atau peristiwa yang terkait dengan kegiatan pembangunan. Para pelopor / jurnalis yang peduli terhadap *development reporting* tersebut mendapat sebutan (dengan istilah) jurnalisme pembangunan. Setelah beberapa aktivitas yang diprakarsai oleh Juan Mercado (direktur Phillipine Press Institute), maka pada tahun 1967 didirikanlah *Press Foundation of Asia* yang mempromosikan jurnalisme pembangunan melalui sebuah kantor berita *Depth news*. Pada tahun 1968, *Press Foundation of Asia* menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan *development reporting* ini, yakni “kursus latihan penulis ekonomi se Asia yang pertama kali. Dari hasil latihan tersebut perlu adanya penekanan bagi jurnalisme pembangunan di dalam melakukan *development reporting*, yakni tentang pentingnya materi pembangunan ekonomi di Asia dan teknik penulisan yang jelas.

Development support communication bersumber dari kalangan badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) : *United National Development Programme (UNDP)* di Bangkok. Komunikasi penunjang pembangunan dirancang oleh *Erskine Childers* untuk menunjang berbagai proyek pembangunan melalui program UNDP. Berdasarkan asal-usul istilah, menurut *Gercelea* komunikasi penunjang pembangunan disebut juga komunikasi penyuluhan/ komunikasi pertanian, yaitu komunikasi yang ditujukan untuk menunjang pembangunan nasional dan local, khususnya di negara-negara berkembang. *Development support communication* adalah penggunaan yang berencana sumber-sumber (*resources*) informasi dan komunikasi (tenaga, biaya, fasilitas, peralatan, dan media) oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan (*Sumadi Dilla, 2007*).

Istilah *development advertising* (periklanan pembangunan) diajukan relative belakangan. Kegiatan inilah yang kemudian meluas dan dicakup dalam konsep dan

praktek komunikasi pembangunan seperti yang berkembang pada masa sekarang ini. Konsep *development advertising*, merujuk pada pengertian tindakan-tindakan promosi yang dilakukan pemerintah dan pihak lain dalam mempengaruhi masyarakat agar tergerak dan terlibat/berpartisipasi sesuai pesan yang dimuat dalam iklan tersebut.

Penyuluhan pertanian (*agricultural extension*) di Indonesia sebagai kegiatan telah ada semenjak didirikannya Kebun Raya Bogor oleh Reinwardt pada tahun 1817. Pada tahun 1905 dibentuk *Departement van Landbouw*, diantaranya bertugas melaksanakan penyuluhan. Disini penyuluhan ditujukan untuk menyalurkan hasil-hasil penelitian, pembagian bibit unggul, dan mengajarkan cara-cara perlindungan tanaman. Tahun 1910 dibentuk *Landbouw voorlichttingdienst* (LVD) yang pelaksana penyuluhannya tetap dilakukan Pangreh Praja. Baru tahun 1921, penyuluhan dilakukan oleh aparat LVD dan ternyata memberikan hasil yang baik. Akhirnya LVD dilepaskan dari Pangreh Praja dan dijadikan Dinas Daerah Propinsi yang secara teknis bertanggung jawab kepada *Departement van Landbouw* (Departemen Pertanian).

Kegiatan penyuluhan semakin berkembang dengan dibukanya sekolah-sekolah pertanian dan didirikannya AVB (*Algemene Volks Credietbank*) atau Bank Rakyat untuk menunjang pembiayaan pertanian. Pada era ini konsep penyuluhan pertanian lebih professional dengan tenaga penyuluh memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai. Dalam prakteknya system penyuluhan diterapkan secara "*olievleksystem*", atau system tetesan minyak dengan pendekatan individual. Di era Orde Baru penyuluhan pertanian berperan sebagai ujung tombak dalam mensukseskan program-program pembangunan pertanian pemerintah. Penyuluhan pertanian adalah system pendidikan non formal untuk para petani dan keluarganya agar mereka mampu, sanggup dan berswadaya meningkatkan kesejahteraannya dan masyarakat sekitarnya (Padmanagara, dalam Suhardiyono, 1992).

PERANAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN UNTUK PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan masyarakat juga memberikan penguatan pada pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai modern seperti: kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggung-jawaban, pembaruan lembaga-lembaga social, dan pengintegrasian ke dalam pembangunan, serta peranan masyarakat di dalamnya adalah pokok dari upaya pemberdayaan ini. Yang sungguh penting adalah

peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya (Kartasasmita, 1996). Dalam proses pemberdayaan juga mengandung arti melindungi, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai social. Peningkatan yang dituju tidak hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya. Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Pemberdayaan bertitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan akan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat sebagai bahan kajian keilmuan sudah relative agak lama, namun dalam terapannya sebagai kebijakan (untuk strategi pembangunan di Indonesia) baru mencuat pada akhir-akhir sebelum masa Orde Baru runtuh oleh ketua Bapenas Ginanjar. Pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai sebuah strategi pembangunan yang berakar kerakyatan.

Dengan mendasarkan pada konsep pemberdayaan masyarakat tersebut, maka bisa dikaji bagaimana peranan komunikasi pembangunan terhadapnya. Setiap konsep yang ada dalam komunikasi pembangunan (*development reporting, development support communication, development advertising, dan agricultural extension*) akan memiliki peranannya masing-masing pada *level dan bidang singgung yang beragam* dengan pemberdayaan masyarakat.

Development reporting akan memberikan tambahan informasi yang lebih objektif dari suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah (atau pihak lain). *Development reporting* memiliki peran komplementer ataupun mensubstitusi melalui temuan lapang baru dari suatu laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Di sini peliputan pembangunan bisa berperan membantu mengungkapkan berbagai permasalahan dan potensi masyarakat atau informasi lain yang belum dilaporkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. *Development reporting* akan memberikan masukan dan koreksi bagi pemerintah daerah maupun pusat, yang akhirnya akan melahirkan kebijakan dan program-program pemerintah yang lebih baik lagi (yang mengakomodasi permasalahan yang sebenarnya di tingkat lapangan) untuk diterapkan dalam program pembangunan pada tahap / tahun berikutnya.

Peran penting *development support communication* adalah bagaimana memanfaatkan berbagai *resources* dan sarana komunikasi yang dikuasai oleh berbagai elemen masyarakat dan pemerintah untuk dikelola secara lebih terencana untuk efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat. Para *change agent* (pemerintah dan elemen masyarakat lainnya) saling mengirim dan menerima (bertukar) informasi yang bisa dijadikan dasar atau bahan pemikiran untuk kegiatan pemberdayaan.

Untuk persoalan-persoalan tertentu yang belum banyak diketahui oleh public, sementara *change agent* dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat memandang *urgent* untuk diketahui umum dan atau dipandang perlu penanganan segera, maka melalui *development advertising* merupakan sarana yang dipandang membantu. Peran promosi ini bisa dilakukan melalui komunikasi massa, melalui komunikasi kelompok (misalnya: melalui jaringan kerja sama LSM, atau jaringan kerja sama penggerak pemberdayaan masyarakat), atau komunikasi interpersonal (hubungan telepon, presentasi, pengajuan proposal dsb).

Istilah penyuluhan bisa diterapkan untuk berbagai bidang, namun penulis memandang penting untuk membahas penyuluhan pertanian. *Agricultural extension* memiliki peran penting dalam Pemberdayaan masyarakat. Penyuluhan pertanian merupakan pendidikan non formal kepada masyarakat tani, dan masyarakat tani merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Penyuluhan pertanian merupakan factor pelancar dalam pembangunan pertanian. Hal mana pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan bidang ekonomi. Penyuluhan pertanian memiliki peran penting dalam upaya peningkatan SDM khususnya terhadap masyarakat tani, melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perbaikan ketrampilan dalam penerapan berbagai teknologi dan inovasi pertanian. Penyuluhan pertanian mempunyai orientasi/tujuan tidak hanya meningkatkan ekonomi tapi juga aspek social, peningkatan harkat dan martabat manusia. Jadi secara substansial melakukan penyuluhan dalam arti yang sebenarnya berarti melakukan pemberdayaan masyarakat tani dalam arti yang sebenarnya pula.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PRAKTEK

Nampaknya agak sulit untuk mengkategorikan apakah program pembangunan yang dilakukan pemerintah merupakan kegiatan yang didasarkan pada konsep pemberdayaan masyarakat atukah tidak. Memang mudah untuk mengatakan bahwa pembangunan pabrik pupuk kimia, dan proyek mobil nasional bukanlah pembangunan

yang didasarkan pada konsep pemberdayaan masyarakat. Namun untuk program-program pembangunan yang lainnya yang bisa dirasakan adalah derajat atau kadarnya. Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada awal dan pertengahan masa Orde Baru (tahun 60-an dan tahun 70-an) nampak memiliki konsep pemberdayaan masyarakat yang rendah. Namun sudah di dasarkan pada kondisi dan situasi masyarakat pada masanya, setidaknya menurut kacamata pemerintah. Setiap program-program pembangunan selalu seragam untuk seluruh wilayah Indonesia, sementara pada kenyataan berbagai daerah memiliki keanekaragaman, baik menyangkut kondisi fisik wilayah (topografi, jenis tanah, kondisi dan ketersediaan air, dsb) maupun kondisi social-ekonomi dan budaya masyarakatnya. Setiap daerah memiliki sumber daya fisik, sumber daya nabati dan hewani, serta sumberdaya manusia yang bervariasi. Program pembangunanyang memiliki derajat pemberdayaan yang dirasa rendah di masa lau misalnya adalah: pembangunan cengkeh melalui BPPC, program Bimas padi (program swa sembada beras), model penyuluhan Lakusi (latihan kunjungan dan supervise), program Tebu Rakyat Intensifikasi (program swa sembada gula), program KB, program lahan pertanian sejuta hektar, program transmigrasi, dsb-nya. Memang program Bimas padi melibatkan semua petani di Indonesia, namun sematasebagai objek pembangunan.

Jika dibanding program pembangunan yang lahir pada periode akhir masa Orde Baru (tahun 80-an dan tahun 90-an), nampak bisa dirasakan bahwa dalam periode ini lebih memiliki derajat pemberdayaan masyarakat yang relative lebih lebih baik; seperti: program PHT (pengendalian hama terpadu) dengan SLPHT (sekolah lapangan pengendalian hama terpadu)-nya, program JPS (Jaring Pengaman Sosial), program IDT (Inpres Desa Tertinggal), program P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil), dan sebagainya. Walaupun perencanaan dan pelaksanaannya diatur sedemikian rupa oleh pemerintah, namun dalam kegiatannya dilapangan masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk berkreasi.

Terlihat bahwa program pembangunan dengan tingkat pemberdayaan yang rendah memberi peluang tinggi untuk gagal (misalnya: BPPC, program TRI, proyek lahan pertanian sejuta hektar), berhasil dengan baik tetapi tidak sustain/berlanjut (missal: program Bimas padi: swa sembada beras). Sementara Lakusi seperti hidup tidak, dan kalau dikatakan matipun juga tidak. Latihan Kunjungan dan Supervisi (Lakusi) adalah suatu system penyuluhan yang terorganisasikan secara tertentu dan dengan system kerja yang tertentu pula, yang pertama kali diterapkan sejak tahun 1975/1976 di propinsi

Jawa Barat dan Jawa Timur. System kerja dalam Lakusi adalah bahwa seorang penyuluh (PPL) membimbing sejumlah 16 kelompok tani di wilayah kerja (WKPP)-nya. Pada minggu I, II, III dan III, hari Senin sampai Kamis, PPL melakukan *kunjungan* ke kelompok pertama(1) hingga kelompok enam belas (16), jadi setiap hari mengunjungi dua (2) kelompok tani. Pada Hari Jumat minggu I, II, III dan IV dilakukan *latihan* di BPP/kabupaten yang dipimpin oleh PPS, PPM, diskusi, mengerjakan administrasi dll.Sedangkan Hari Sabtu minggu I, II, III dan IV biasanya untuk berbagai kegiatan kunjungan pengganti, menengok pengujian, pengerjaan administrasi yang belum selesai, dsb. Sedangkan *supervisi* adalah pelaksanaan pemantauan berbagai kegiatan penyuluhan yang dilakukan PPL baik dalam kegiatan *latihan* (dan terutama) maupun *kunjungan*, oleh seorang Supervisor maupun oleh instansi yang memiliki wewenang melakukan tugas ini.

Hanya program KB (Keluarga Berencana), yang berhasil dengan baik, dan berlanjut (menjadi pola dalam kehidupan keluarga: keluarga kecil, cukup dua anak) walaupun program tersebut telah dihentikan.

Sedangkan program pembangunan dengan derajat pemberdayaan masyarakat yang dirasa lebih baik, prestasinya tidak seheboh swa sembada beras.Namun kita juga tidak menemukan program yang gagal total. Program PHT berhasil dengan baik, dan berlanjut sampai sekarang (walaupun sudah tidak ada proyek SLPHT). Misalnya Ada ketrampilan dasar yang harus dikuasai petani dari penyelenggaraan SLPHT yakni: a) pengenalan dan kemampuan mengidentifikasi musuh alami, hama, maupun pola penyerangannya yang dapat dilepalajari melalui analisis system; b) pengambilan keputusan yang dikaitkan dengan manfaat dan pembiayaannya dalm usahatani (Gallagher, Kevin D.; dkk. 1991). Hal ini masih tetap melekat dan menjadi dasar acuan petani dalam bertindak terkait dengan usahatannya.Bahkan orang mulai mengarah pada produk-produk organic.Sementara program-program pembangunan yang lainnya, cukup memberi efek yang baik, walaupun proyek tersebut telah selesai.

Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K) merupakan proyek pendidikan bagi petani nelayan kecil (PNK) yang tergabung dalam kelompok petani-nelayan kecil (KPK) yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan di pedesaan. P4K berjalan dalam kurun waktu yang relative lama untuk suatu proyek, yakni sejak akhir tahun 1979 sampai akhir tahun 2005, yang pendanaannya dari APBN,sebagian dari pinjaman ADB serta IFAD (Anonymous, 1999). Secara makro kegiatan ini meliputi 3 proses kegiatan, yakni: proses penumbuhan KPK, proses penguatan kapasitas KPK

dan proses monitoring-evaluasi. Ada 7 *guidance principle* dalam penumbuhan dan penguatan kapasitas PNK, yakni: partisipatif, keswadayaan, keserasian, kepemimpinan dari mereka sendiri, kesatuan keluarga, belajar menemukan sendiri (*discovery learning*), dan kemandirian. Serta dengan 15 langkah dalam penumbuhan dan pembinaan PNK-nya seperti: identifikasi dan pemilihan lokasi, sensus rumah tangga miskin, konsultasi, *participatory rural appraisal* (PRA), pembentukan KPK, penentuan pelaku penumbuhan KPK, pembentukan dan pengembangan diri anggota yang aktif, pemupukan dan pengembangan dana bersama kelompok, pemantapan dan pengembangan usaha anggota dan kelompok yang menguntungkan, perintisan dan pemantapan jalinan hubungan yang saling menguntungkan dengan pihak lain, sampai akhirnya pada tahap pemandirian kelompok untuk mewujudkan KPK yang mandiri. Akhirnya tercapai graduasi PNK, yakni PNK yang memiliki pendapatan keluarga per kapita per tahun melampaui garis kemiskinan. Dan juga secara berkelompok atau individual telah memiliki akses ke sumber layanan permodalan, lingkup pasar yang luas dan bantuan teknik yang diperlukan untuk pengembangan usaha dengan mekanisme pasar. Proyek P4K inilah program pembangunan yang lebih mendekati dengan konsep pemberdayaan masyarakat dalam arti yang sebenarnya.

Proyek P4K menunjukkan sebuah konsep pemberdayaan yang nampaknya paling ideal. Hal mana program ini mencoba mengenali permasalahan kemiskinan dan mencoba mengangkatnya berdasarkan situasi dan kondisi serta berbagai persoalan yang dihadapi petani-nelayan kecil di pedesaan. Proyek nampak di desain secara lebih serius dengan *guidance principle* yang benar-benar berangkat dari nilai-nilai rakyat kecil. Langkah-langkah penumbuhan dan penguatan KPK-nyapun terlihat teliti. Walaupun program ini dilahirkan di masa Orde Baru, nampak ada dinamika dan kreativitas di lapangan dalam pelaksanaan program P4K tsb terutama selepas jatuhnya Orde Baru.

PENDEKATAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DI ERA OTONOMI DAERAH

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Anonimous, 2003). Semangat Otonomi Daerah telah melahirkan tiga buah Undang-Undang penting, yakni UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan UU No 28 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Serta dilengkapi dengan juklak Otda baik berupa Kepres maupun Peraturan Pemerintah.

Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi dan wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja (Anonymous, 2003). Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dipimpin oleh Kepala Daerah (bupati/ walikota) untuk menyelenggarakan pemerintahan kabupaten/kota berdasar kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD II. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Selanjutnya dalam pasal 62 UU No22 Tahun 1999 diungkapkan bahwa unsur pelaksana pemerintah daerah dilakukan oleh dinas daerah. Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat oleh kepala Daerah. Sehingga kepala dinas bertanggung jawab pada kepala daerah (bupati).

Setidaknya ada tiga kerangka pemahaman mengenai komunikasi, yakni komunikasi sebagai tindakan satu arah (*communication as action*), komunikasi sebagai interaksi (*communication as interaction*) dan komunikasi sebagai transaksi (*communication as transaction*) (West and Turner, 2007; Mulyana, 2007). Dalam era desentralisasi dan kebebasan berekspresi bagi setiap warga negaranya, maka konsep komunikasi lebih ditekankan pada komunikasi sebagai transaksi dan interaksi dari pada komunikasi sebagai tindakan satu arah. Komunikasi sebagai tindakan satu arah hanya digunakan dalam konteks komunikasi (pembangunan) yang sudah didahului oleh kesepakatan berbagai pihak dalam komunikasi transaksi atau interaksi sebelumnya.

Proses komunikasi pembangunan akan lebih terbuka bagi semua pihak yang berkompoten untuk secara pro aktif ikut berpartisipasi. Namun perlu disadari bahwa kemampuan kabupaten/kota antara yang satu dengan daerah yang lain memiliki perpaduan SDA, SDM, sumber daya modal dan prasarana yang berbeda-beda; maka hal ini juga akan berpengaruh terhadap proses komunikasi pembangunan secara keseluruhan. Namun jelas mengarah pada pemahaman komunikasi sebagai transaksi dan interaksi dari pada sebagai tindakan satu arah.

Demikian juga pendekatan komunikasi pembangunan di era otonomi lebih mengarah pada pola komunikasi bottom-up atau setidaknya kombinasi antara bottom-up dan top-down dari pada semata-mata pendekatan top-down. Hal ini pun juga akan sangat beragam antara kotasabupaten/kota yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan komposisi berbagai sumber daya (*resources*) setempat, khususnya bagaimana profil

SDM birokrat dan masyarakatnya. Terkait dengan profil SDM, yang dapat berpengaruh terhadap dinamika dan arah perkembangan pola komunikasi pembangunan yang terjadi akan berkaitan dengan aspek demografis (struktur usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan formal, dsb), aspek psikografis (seperti motivasi, kepribadian, sikapnya terhadap pembaharuan, sikapnya terhadap informasi atau inovasi baru dsb), dan aspek sosiografis (hubungan social, kehidupan berorganisasi, kekosmopolitan, kepedulian terhadap persoalan sekitar, empathy, solidaritas, dsb). Proses komunikasi dalam pembangunan yang lebih menekankan proses interaktif dan transaksional dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat lebih di era ini dalam menyambut MEA 2015 dengan segala konsekuensinya.

KESIMPULAN

Kehadiran komunikasi pembangunan memberikan kontribusi terhadap berbagai pemecahan masalah komunikasi dalam program-program pembangunan. Seiring dengan kompleksitas permasalahan pembangunan, maka berkembang pula konsep-konsep yang ada dalam komunikasi pembangunan tersebut, diantaranya adalah *development reporting*, *development support communication*, *development advertising*, serta penyuluhan khususnya *agricultural extension*. Masing-masing konsep dalam komunikasi pembangunan tersebut memiliki peran yang penting dan berbeda satu dengan lainnya dalam menunjang keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Hal mana pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai salah satu strategi pembangunan yang berakar kerakyatan.

Pada kenyataannya di lapangan banyak program pembangunan yang kurang di dasarkan pada konsep pemberdayaan masyarakat. Setelah Orde Baru dan memasuki era reformasi dan Otonomi Daerah, konseptualisasi komunikasi bergeser dari konsep komunikasi sebagai tindakan satu arah, menuju konsep komunikasi sebagai transaksi dan interaksi. Demikian pula pendekatan komunikasi pembangunannya, bergeser dari *pola top-down* semata bergeser ke arah *bottom-up* atau setidaknya kombinasi antara *bottom-up* dan *top-down*. Hal ini memberikan iklim kondusif terjadinya pemberdayaan masyarakat dalam arti yang sebenarnya, sehingga kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan yang seharusnya dikehendaki bersama oleh suatu bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 1999. Matriks Perencanaan Proyek P4K, Final Draft 30 November 1999; Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian, Jakarta.
- Anonimous, 2003. Undang-Undang Otonomi Daerah (UU No 22, 25 dan 28 tahun 1999), Citra Umbara, Bandung.
- Dilla, Sumadi. 2007. Komunikasi Pembangunan, Pendekatan Terpadu; Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Gallagher, Kevin D.; dkk. 1991. Buku Petunjuk Lapangan untuk Pengendalian Hama Terpadu Padi; Proyek Prasarana Fisik Bappenas, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan yang Berakar Kerakyatan; Bappenas, Jakarta.
- Kartasapoetra, AG. 1994. Teknologi Penyuluhan Pertanian; diterbitkan oleh Bumi Aksara, Jakarta.
- Mardikanto, T. 1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian; Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Mulyana, Deddy. 2007. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution, Z. 1990. Prinsip Prinsip Komunikasi untuk Penyuluhan; Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nazution, Z. 1996. Komunikasi Pembangunan, Pengenalan Teori dan Penerapannya, Edisi Revisi; Raja Grafindopersada, Jakarta.
- Rogers EM. 1976. Komunikasi dan Pembangunan, Perspektif Kritis; Lembaga Penelitian dan Penerangan Ekonomi dan Sosialj Jakarta.
- Soekartawi, 1988. Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian; Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Suhardiyono, L. 1992. Penyuluhan, Petunjuk bagi Penyuluh Pertanian; Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Suwandi, 2003. Petunjuk Teknis (Juknis) Penumbuhan dan Penguatan Kapasitas Kelompok Petani-Nelayan Kecil (KPK); Departemen Pertanian, Badan Pengembangan SDM Pertanian, P4K, Jakarta.
- Untung, Kasumbogo. 1996. Pengantar Pengelolaan Hama Terpadu; Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Usman, Sunyoto, 2003. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- West, R; Lynn H. Turner. 2007. Introducing Communication Theory, Analysis and Application, Third Edition, McGraw-Hill, New York.

Widayati. 2004. Pengalaman Membantu Petani-Nelayan Kecil dan Penduduk Miskin di Perdesaan Melalui Pola P4K (menyuburkan harapan di ladang-ladang kecemasan) di Kabupaten Purwakarta.